

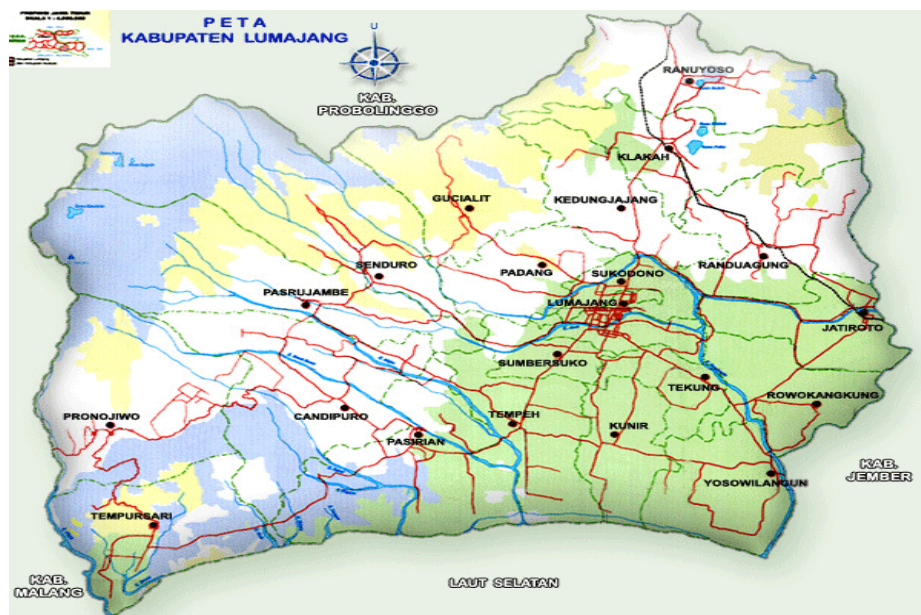
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.



Gambar 4 : Peta Kabupaten Lumajang
Sumber: Lumajangkab.go.id

Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya

adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km² , di mana dibagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan. Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur , berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudra Hindia.

a. Kondisi Geografis Kabupaten Lumajang

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112 53' – 113 23' Bujur Timur dan 7 54' - 8 23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24C – 23C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5C.

Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat Kabupaten Malang.
2. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
3. Sebelah Timur kabupaten Jember.
4. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Prop. Jawa Timur, produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

b. Kondisi Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Lumajang terbagi atas 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Lumajang terdiri dari : 5 Desa, 7 Kelurahan.
2. Kecamatan Sukodono terdiri dari : 10 Desa.
3. Kecamatan Senduro terdiri dari : 12 Desa.
4. Kecamatan Gucialit terdiri dari : 9 Desa.
5. Kecamatan Padang terdiri dari : 9 Desa.
6. Kecamatan Pasrujambe terdiri dari : 7 Desa..
7. Kecamatan Klakah terdiri dari : 12 Desa.
8. Kecamatan Ranuyoso terdiri dari : 11 Desa.
9. Kecamatan Randuagung terdiri dari : 12 Desa.

10. Kecamatan Kedungjajang terdiri dari : 12 Desa.
11. Kecamatan Yosowilangun terdiri dari : 12 Desa.
12. Kecamatan Jatiroto terdiri dari : 6 Desa.
13. Kecamatan Rowokangkung terdiri dari : 7 Desa.
14. Kecamatan Kunir terdiri dari : 11 Desa.
15. Kecamatan Tekung terdiri dari : 8 Desa.
16. Kecamatan Pasirian terdiri dari : 11 Desa.
17. Kecamatan Tempeh terdiri dari : 13 Desa.
18. Kecamatan Candipuro terdiri dari : 10 Desa.
19. Kecamatan Pronojiwo terdiri dari : 6 Desa.
20. Kecamatan Tempursari terdiri dari : 7 Desa.
21. Kecamatan Sumpoko terdiri dari : 8 Desa.

Dari 205 Desa / Kelurahan, terdiri dari 2 kategori, yaitu :

- a. Desa Definif sebanyak : 198 Desa.
- b. Kelurahan sebanyak : 7 Kelurahan.

c. Keadaan Statistik

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak, dengan tingkat proporsi yang beragam pula.

1. Lahan Sawah.

- a. Irigasi Teknis : 21.772 Ha
- b. Irigasi Setengah Teknis : 7.595 Ha
- c. Irigasi Sederhana : 4.691 Ha
- d. Irigasi desa no/PU : 1.607 Ha
- e. Tadah hujan : 333 Ha
- f. Pasang surut : - Ha
- g. Lebak : - Ha
- h. Polder dan sawah lainnya : - Ha

2. Lahan Kering.

- a. Tegal/kebun : 55.931 Ha
- b. Ladang/huma : 0 Ha
- c. Perkebunan : 16.316 Ha
- d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 4.255 Ha
- e. Tambak : 53 Ha
- f. Kolam/Tebat/Empang : 74 Ha
- g. Pengembalaan Padang Rumput : 4 Ha
- h. Sementara Tidak Diusahakan : 148 Ha
- i. Lain-lain (Pekarangan yang Ditanam Pertanian) : 7.729 Ha

3. Lahan Lainnya.

- a. Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya : 13.336 Ha
- b. Hutan Negara : 28.947 Ha
- c. Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanam) : 146 Ha

d. Lainnya (Jalan,Sungai,Danau,Lahan Tandus) : 19.101 Ha

Total wilayah provinsi (jumlah lahan sawah dan lahan bukan sawah):
179.090 Ha.

Dari data tersebut, tampak hasil utama daerah Lumajang adalah pertanian dan perkebunan, selain itu juga memanfaatkan hasil hutan yang ada. Padi dan palawija merupakan hasil andalan,mdemikian juga tebu dan pabrik gula Jatiroto sebagai pusat pengolahannya dapat diandalkan sebagai penghasil utama bagi daerah Lumajang.

Demikian pula hasil perkebunan teh dari Kertowono sebagian besar untuk ekspor teh, kopi, coklat maupun damar, meskipun tidak terlalu besar tapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

d. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif cukup beragam. Dengan karakter wilayah yang cukup beragam ini ditandai dengan adanya wilayah pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, dan lain sebagainya. Dengan potensi dan wilayah yang ada, maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan pada wilayah bersangkutan dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam penggunaan lahan, Kabupaten Lumajang di dominasi oleh lahan kawasan hutan, meliputi kawasan hutan lindung dan taman nasional. Hutan produksi dan hutan rakyat dengan luas

114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Luamajang. Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitu budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya perkebunan, pemukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang dikawasan Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun, sehingga pengalokasian ketersediaan lahan skala kabupaten dapat diaplikasikan dengan dikembangkanya kawasan budidaya antara lain:

1. Kawasan Perdagangan dan jasa

Peruntukkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di kembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang mencakup pengembangan skala wilayah meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, Senduro, Klakah, Dan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain dikembangkan perdagangan lokal.

2. Kawasan pemukiman

Pengembangan kawasan pemukiman di bedakan atas pemukiman perkotaan dan pemukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh Kecamatan Kabupaten Lumajang.

3. Kawasan pendidikan

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.

4. Kawasan pemerintahan dan perkantoran

Pengembangan kawasan pemerintah dan perkantoran diarahkan menyebar di seluruh kecamatan Kabupaten Lumajang.

5. Kawasan industri

Berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Lumajang tidak direncanakan sebagai kawasan industri, namun dikembangkan sebagai kawasan peruntukkan industri dimana dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Kawasan peruntukkan industri besar di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Summersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah.
- b. Kawasan peruntukkan industri menengah dikembangkan di Kecamatan Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, Rowokangkung, Randuagung, dan Ranuyoso.
- c. Kawasan peruntukkan industri kecil dan atau mikro, dikembangkan diseluruh kecamatan.

6. Kawasan pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata dibagi atas dua jenis yaitu:

a. Pengembangan daya tarik wisata, meliputi:

1) Pariwisata alam:

a) Taman wisata

- b) Taman wisata ranu
 - c) Taman wisata goa
 - d) Taman wisata air terjun
 - e) Wisata pantai
 - f) Wisata pemandian alam
- 2) Pariwisata budaya
 - 3) Pariwisata buatan
- b. Pengembangan jalur koridor wisata diarahkan pada Kecamatan Senduro, Ranuyoso, Tempursari, dan Candipuro.

7. Kawasan pertanian

Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada pelestarian dan pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi terbangun melalui penetapan lahan perhatian pangan berkelanjutan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.

8. Kawasan pertambangan

Kawasan pertambangan tidak diarahkan pada pengembangan koridor atau wilayah, melainkan diarahkan pada pengembangan budidaya potensi bahan galian yaitu, pada Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Pronojiwo, Pasrujambe, Senduro, Candipuro, Summersuko, dan Ranuyoso.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

a. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

3. Bidang Kebudayaan, membawahi :

- a. Seksi Kepurbakalaan dan Kesenjaraan;
- b. Seksi Kesenian.

4. Bidang Sarana Wisata, membawahi :

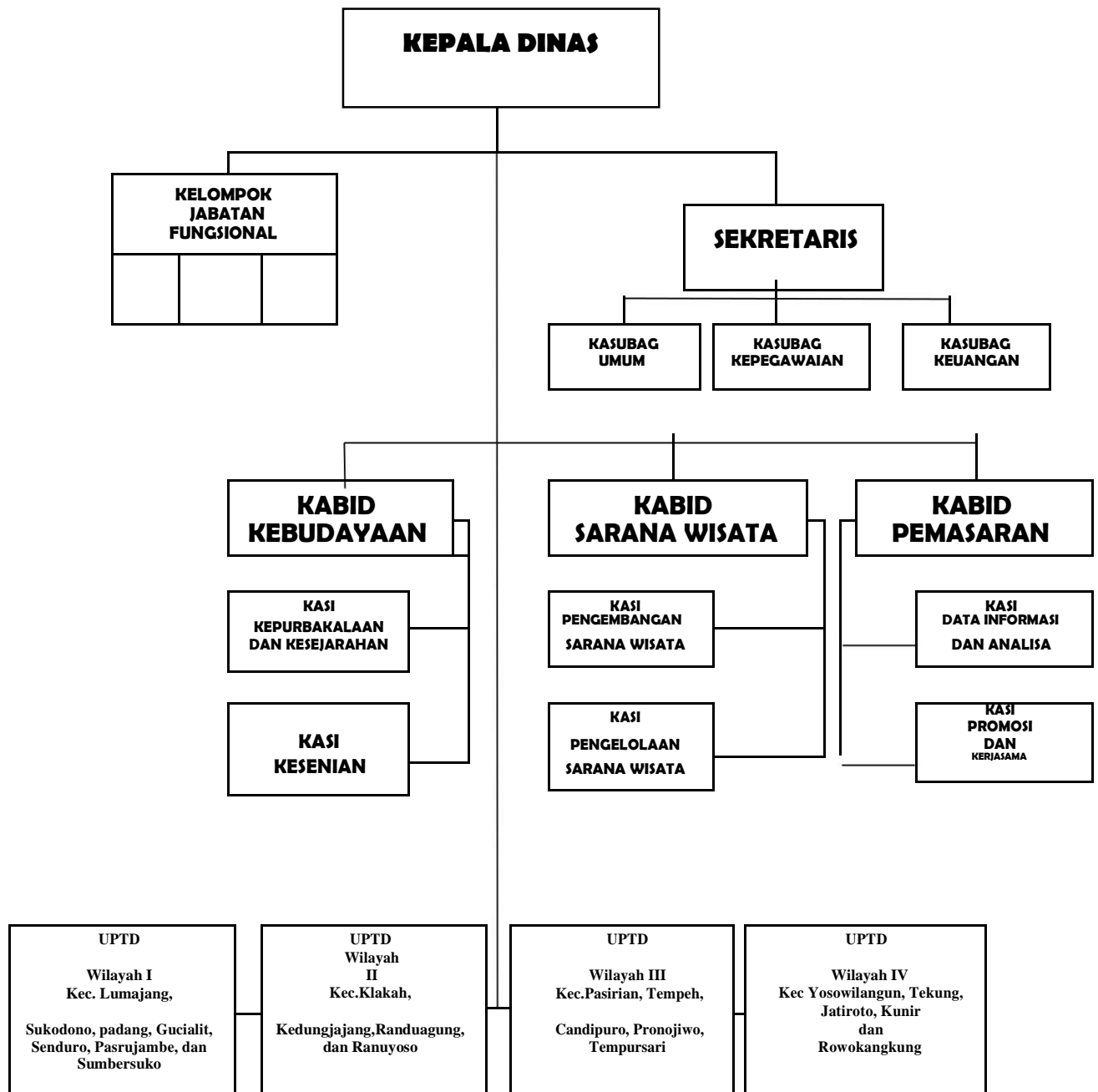
- a. Seksi Pengelolaan Sarana Wisata;
- b. Seksi Pengembangan Sarana Wisata.

5. Bidang Pemasaran, membawahi :

- a. Seksi Data, Informasi dan Analisa Pasar;
- b. Seksi Promosi dan Kerjasama.

6. Kelompok Jabatan dan Fungsional;

7. Unit Pelaksana Teknis.



Gambar 5 : Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Sumber : Rencana Strategis 2015-2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

b. Tugas Pokok dan fungsi

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata adalah sebagai berikut : (masih Raperbub)

1. KEPALA DINAS :

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan Program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Mengesahkan kebijakan teknis dan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Mengatur dan mengarahkan tata kelola Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Mengatur dan mengarahkan tata kelola sarana dan prasarana Dinas;
 - f. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja kebudayaan dan pariwisata;
 - h. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan program kerja kebudayaan dan pariwisata;
 - i. Melaksanakan hubungan kerjasama dalam upaya tata kelola kebudayaan dan pariwisata;
 - j. Membina dan memfasilitasi peran serta swasta dan lembaga lain dalam peningkatan kebudayaan dan pariwisata;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;

- l. Melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Fungsi Pemimpin, Pengkoordinir, Pembina, Perumusan, kebijakan teknis serta penanggung jawab pelaksana kinerja Kebudayaan dan Pariwisata;

2. SEKRETARIS :

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Mengatur tata kelola pelayanan administrasi dan fungsional;
 - e. Mengatur tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, evaluasi serta pelaporan;
 - f. Mengatur pelaksanaan tata kelola naskah dinas dan produk hukum;
 - g. Membina, mengarahkan, dan menilai kinerja bawahan;
 - h. Membantu mengarahkan dan mendistribusikan naskah dinas;
 - i. Meneliti dan mengkaji naskah dinas dan kebijakan teknis pengelolaan data;

- j. Mengatur tata kelola pelayanan pengaduan masyarakat;
 - k. Menyiapkan data hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
 - l. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - m. Melaporkan seluruh kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin Sekretariat, pengkoordinir program, pengelolaan tata laksana dan tata naskah, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga, administrasi keuangan, serta penanggung jawab kerja sekretariat.

3. BIDANG KEBUDAYAAN :

- 1) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok:
- a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang kebudayaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang kebudayaan;
 - c. Mengatur persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang kebudayaan;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang kebudayaan;
 - e. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan;
 - f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan kebudayaan;
 - g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan bidang kebudayaan;

- h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis bidang kebudayaan;
 - i. Membantu pelaksanaan koordinasi terkait bidang kebudayaan;
 - j. Membantu mengevaluasi kinerja UPT;
 - k. Membantu mengatur tata kelola kebijakan teknis di lapangan;
 - l. Mengkaji pedoman kerja dan produk hukum yang berkaitan dengan kebudayaan;
 - m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - n. Melaporkan seluruh kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Kebudayaan di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan kinerja sesuai bidang kerjanya;

4. BIDANG SARANA WISATA :

- 1) Kepala Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok:
- a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang sarana wisata;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang sarana wisata;
 - c. Mengatur persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang sarana wisata;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan bidang sarana wisata;
 - e. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan dibidang sarana wisata;
 - f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan bidang sarana wisata;
 - g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang sarana wisata;
 - i. Membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan bidang sarana wisata;
 - j. Membantu mengevaluasikan kinerja UPT;
 - k. Membantu tata kelola kebijakan teknis dilapangan tentang sarana wisata;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas;
 - m. Melaporkan seluruh kegiatan bidang sarana wisata kepada kepala Dinas;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
- 2) Kepala Bidang di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis perumusan dan penyusunan program kerja serta pelaksanaan kinerja sesuai bidang kerjanya.

5. BIDANG PEMASARAN :

- 1) Kepala bidang Pemasaran mempunyai tugas pokok;
 - a. Merumuskan rencana kegiatan tahunan bidang pemasaran;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan bidang pemasaran;
 - c. Mengatur persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bidang pemasaran;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan yang berkaitan dengan bidang pemasaran;
 - e. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan dibidang pemasaran;
 - f. Melaksanakan pembinaan berkaitan dengan bidang pemasaran;
 - g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;
 - h. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran;
 - i. Membantu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemasaran;
 - j. Membantu mengevaluasikan kinerja UPT;
 - k. Membantu tata kelola kebijakan teknis dilapangan tentang pemasaran;
 - l. Melaksanakan survei pusat wisata
 - m. Mengkaji pedoman kerja dan produk hukum yang berkaitan dengan pemasaran;

- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas;
- o. Melaporkan seluruh kegiatan bidang pemasaran kepada kepala Dinas;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

c. Sumber Daya SKPD

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	18
2	Strata 1 (S1)	-
3	Sarjana Muda (D3)	6
4	SLTA / SMK	5
5	SLTP	9
6	SD	10
<i>Jumlah</i>		36

Sumber : *Rencana Strategis 2015-2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2014.*

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti Diklat Penjurangan

No.	Diklat Penjurangan	Jumlah
1	ADUM / ADUMLA / PIM TK. IV	-
2	SPAMA / PIM TK. III	-
3	SPAMEN / PIM TK. II	-
<i>Jumlah</i>		

Sumber : Rencana Strategis 2015-2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	I	12
2	II	4
3	III	18
4	IV	2
<i>Jumlah</i>		36

Sumber : Rencana Strategis 2015-2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

Tabel 6. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	10
4	Fungsional	-
5	Staf	21
<i>Jumlah</i>		36

Sumber : Rencana Strategis 2015-2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2014.

d. Visi dan Misi

1. Visi

Bertitik tolak dari pengertian Visi, yaitu pandangan jauh ke depan yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari kekayaan pengalaman serta nilai-nilai yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders, maka pernyataan / rumusan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LUMAJANG SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL YANG BERPELUANG INVESTASI SERTA MAMPU MEMBERIKAN MULTIPLIER EFFECT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH“

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa potensi Kebudayaan dan Kepariwisata di Kabupaten Lumajang perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta upaya pelestariannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga mampu berpeluang terhadap investasi, dapat diandalkan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, seiring dengan besarnya potensi daerah yang dimiliki serta mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional didalam menghadapi era otonomi daerah dan era globalisasi pada saat ini.

1. Misi

Pengertian Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara dan pelaksana pembangunan.

Adapun Misi yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Visinya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian potensi budaya daerah;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata;
- 3) Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

e. Tujuan dan Sasaran

1) Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antar unsur-unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan-tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Untuk melaksanakan misi pertama “Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian potensi budaya daerah“ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan satu tujuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan, pengembangan serta pelestarian terhadap potensi budaya daerah yang dimiliki Kabupaten Lumajang meliputi upaya

pelestarian adat budaya daerah, pengembangan seni budaya daerah serta pelestarian peninggalan sejarah Lumajang.

- b) Untuk melaksanakan misi yang kedua “Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata”. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang dengan memprioritaskan konsep pengembangan satu kecamatan satu desa wisata. Dengan pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat lebih dioptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, sehingga tidak saja mengangkat potensi unggulan yang dimilikinya tetapi juga diharapkan adanya suatu pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan sebagai dampak dari pemberdayaan desa wisata dan dalam rangka mewujudkan pengembangan daerah tujuan wisata melalui pengelolaan dan pengembangan wisata.
- c) Untuk melaksanakan misi ke tiga “Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan“ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan dua tujuan yang berkaitan dengan pemasaran potensi budaya dan pariwisata yang

terdiri dari : (a) mengembangkan pemasaran pariwisata, (b) mengembangkan kemitraan dengan stakeholder.

2) Sasaran

Pengertian sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mencapai sasaran.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut bidang tugas sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1) Bidang Kebudayaan

Pembangunan dibidang Kebudayaan dilakukan untuk pengembangan serta pelestarian kekayaan nilai budaya daerah serta peninggalan sejarah purbakala.

Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang ini adalah : “Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah“. Untuk dapat merealisasikan pelestarian kekayaan nilai budaya daerah serta peninggalan sejarah purbakala sebagai potensi budaya daerah, maka perlu adanya keseriusan terhadap upaya pelaksanaannya yang didukung oleh kebijakan pemangku kepentingan dan peran serta

masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

- a) Jumlah kegiatan festival seni dan budaya
- b) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- c) Cakupan Kajian Seni
- d) Cakupan Fasilitasi Seni
- e) Cakupan Gelar Seni
- f) Misi Kesenian
- g) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian
- h) Cakupan Tempat
- i) Cakupan Organisasi

2) Bidang Sarana Wisata

Pembangunan dibidang Sarana Wisata dilakukan untuk memberdayakan potensi wisata yang dimiliki serta bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta PAD.

Adapun sasaran yang akan dicapai pada bidang ini adalah “Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata” yang didukung dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata;
- b) Persentase peningkatan pelayanan publik;
- c) Persentase peningkatan jumlah industri pariwisata;
- d) Persentase peningkatan peran serta para pelaku wisata didalam industri pariwisata.

3) Bidang Pemasaran

Pembangunan dibidang Promosi dilakukan untuk mendukung upaya pengembangan potensi Kepariwisataaan dan Kebudayaan daerah.

Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang ini adalah :
“Terlaksananya Pengembangan Kepariwisataaan dan Kebudayaan Daerah“

Untuk dapat merealisasikan pengembangan Kepariwisataaan dan Kebudayaan daerah, maka perlu adanya dukungan upaya promosi secara optimal terhadap potensi daerah tersebut.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

- a) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara;
- b) Persentase peningkatan kerjasama masyarakat dalam rangka pemberdayaan pelaku wisata.

Dalam rangka upaya pengembangan Kepariwisataaan dan Kebudayaan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari promosi potensi daerah, regulasi pendukung, fasilitasi kerjasama usaha, penyiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha pariwisata dan seni budaya, sehingga

mampu menarik investor untuk berinvestasi dibidang tersebut di Kabupaten Lumajang.

Upaya-upaya pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Lumajang tersebut perlu dilakukan secara optimal dengan dukungan dan peran serta lintas sektoral dan masyarakat secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan.

B. Penyajian Data Penelitian

1. Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata.

Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata adalah program yang memanfaatkan daya tarik wisata yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Program ini di bentuk pemerintah karena melihat potensi dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Lumajang ini besar, namun pariwisata di Kabupaten Lumajang belum maju dan wisatawan juga rendah. Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Program ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Pembentukan Desa Wisata merupakan pembangunan pariwisata yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap unsur daya tarik wisata alam, budaya dan buatan, dengan tujuan:

- a. Mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata
- b. Mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk desa wisata setempat
- c. Meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial
- e. Meningkatkan keterampilan SDM warga masyarakat desa wisata
- f. Mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata masyarakat

Sasaran program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

- a. Jumlah kegiatan festival seni dan budaya
- b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
- c. Cakupan Kajian Seni
- d. Cakupan Fasilitasi Seni
- e. Cakupan Gelar Seni
- f. Misi Kesenian
- g. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian
- h. Cakupan Tempat
- i. Cakupan Organisasi

2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata, yang didukung dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata;
- b. Persentase peningkatan pelayanan publik;
- c. Persentase peningkatan jumlah industri pariwisata;
- d. Persentase peningkatan peran serta para pelaku wisata didalam industri pariwisata.

3. Terlaksananya Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

- a. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara;
- b. Persentase peningkatan kerjasama masyarakat dalam rangka pemberdayaan pelaku wisata.

Organisasi pelaksana program ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Samapi saat ini sudah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini yaitu, pertama dibentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dimana kelompok ini sebagai penggerak kemajuan desa wisata, acara pembinaan seluruh desa wisata dua kali setiap tahun seperti kemarin pada 2016 dilakukan di Aula Pondok Asri dan Aula Ranu Klakah, juga pelatihan seperti pelatihan bahasa inggris, kuliner, pengelolaan desa wisata yang diadakan provinsi, dan desa wisata di ikutkan dalam even-even seperti kuda kencak pada HUT Kabupaten Lumajang.

Saat ini program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini sudah terbentuk 21 desa wisata pada 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Pembangunan desa wisata tersebut yaitu atas dasar usaha dari masyarakat sendiri dan hasilnya juga diambil masyarakat sendiri, pemerintah seperti

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang hanya melakukan pembinaan kepada masyarakat. Namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga memberikan bantuan dana kepada beberapa desa wisata. Dana tersebut berasal dari APBD dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Desa bidang infrastruktur pariwisata. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan di desa wisata, pada awal pelaksanaannya tahun 2014 dana masih belum tersedia. Kemudian pada tahun 2015 dana diberikan ke desa wisata sumber pujan, tahun 2016 kepada tiga desa yaitu desa Ranu Bedali, Wot Gale dan Penanggal. Tahun 2016 kepada lima desa diantaranya, desa Tegal Randu, Sido Mulyo, Wot Gale, Gucialit dan Sidorejo.

Model implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata sebagai upaya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang ini menggunakan model Kortzen yang dikutip Tarigan (2000:12) yang terdiri dari unsur program (kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran), organisasi pelaksana (kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana), dan kelompok sasaran (kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana). Penyajian datanya sebagai berikut :

a. Program (Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran)

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka melalui pembangunan pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu usaha yang berperan penting dalam menghasilkan sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan sumber devisa, mendorong

pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan serta pensosialisasian pemasaran produk nasional dengan mengedepankan kepribadian bangsa, nilai-nilai budaya dan agama serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Lumajang membuat program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Program tersebut diharapkan mampu menghidupi atau mampu memberikan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang terutama yang lokasinya berada di desa-desa. Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini diterima baik oleh masyarakat Kabupaten Lumajang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

“Menurut pengamatan saya responya baik, buktinya dari 21 desa wisata yang dibentuk itu desa-desa lainnya ingin menjadi desa wisata juga. Seperti desa bades dengan pantai Damparnya, desa condro yang hanya punya gunung Tambu saja itu juga ingin menjadi desa wisata. Jadi antusiasme desa-desa lain ikut berkembang itu juga menandakan program ini berjalan sukses.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Ibu Sulis selaku penduduk desa wisata Argosari kecamatan Senduro berpendapat tentang program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata sebagai berikut:

“Ya wes gini ini mas, sejak ada B-29 itu disini jadi ramai. Banyak orang yang datang untuk melihat B-29. Jadi teman-teman disini itu banyak yang berjualan, membuat penginapan dan jadi ojek gitu mas”. (wawancara pada tanggal 3 oktober 2017)

Berdasarkan penuturan Bapak Iwan dan Ibu Sulis diatas merupakan kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran. Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program yakni program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (masyarakat Kabupaten Lumajang) dapat memajukan sekaligus meningkatkan pendapatan desa dan menambah pekerjaan atau pendapatan bagi masyarakat desa wisata maupun masyarakat dekat desa wisata.



Gambar 6: Obyek Wisata Ranu Kumbolo di Desa Wisata Argosari
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Bapak Edi selaku sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa:

“Visi Kabupaten Lumajang itu kan mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Sejahtera itu kan memberikan suasana berkecukupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik , ketahanan dan keamanan kepada masyarakatnya. Nah, pariwisata diharapkan memberikan dampak terhadap beberapa aspek tersebut. Lumajang ini memiliki banyak potensi alam itu tadi, jadi ini cukup sebagai bahan untuk membangun masyarakat ini sejahtera. Dari mananya? Misalnya orang mau ke salah satu tempat wisata paling tidak dalam perjalananya itu orang-orang tadi menemukan sesuatu yang mereka beli. Dampak-dampak seperti itu yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat Lumajang.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Berdasarkan pendapat Bapak Edi Selaku Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang diatas. Tujuan dibentuknya program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lumajang melalui pembangunan pariwisata. Mensejahterakan masyarakat tersebut melalui memperkenalkan, melestarikan, serta memanfaatkan potensi daya tarik wisata dalam lingkup yang ada di masing-masing daerah atau desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Sehingga potensi daya tarik tersebut mendatangkan keuntungan Kabupaten Lumajang maupun masyarakat Kabupaten Lumajang dari wisatawan yang datang ke Kabupaten Lumajang atau desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang.

Menurut Bapak Supri selaku pemberi layanan jasa ojek desa wisata Argosari obyek wisata Puncak B-29 mengatakan:

“Dulu daerah sini sepi mas, jadi kalau gak berkebun ya mau ngapain lagi. Tetapi semenjak ada b29 diatas, saya sama teman-teman ini yo gitu mas, jadi tukang ojek bagi pengunjung yang sedikit sulit menuju puncaknya. Diitung-itung lumayan buat penghasilan disamping sama berkebun.” (wawancara pada tanggal 3 oktober 2017)

Hasil wawancara dengan Bapak Iwan staf bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada tanggal 28 september 2017 juga mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya program ini sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Karena mereka membangun dengan inisiatif sendiri dan hasilnya juga untuk mereka sendiri. Kita berusaha membantu dan membina mereka hasilnya untuk mereka sendiri, kita tidak

memungut apa-apa dari mereka. Kecuali kalo mereka sudah benar-benar berkembang sudah luar biasa kunjungannya, baru kita disitu menggunakan pajak dan retribusi. Sekarang dalam taraf pembentukan yang masih berkembang, kita bina sampai mereka benar-benar berkembang sampai bisa mengalahkan desa-desa wisata yang ada dikota lain seperti Yogyakarta.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Sesuai dengan pendapat Bapak Supri dan Bapak Iwan diatas.

Pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini sudah dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Program ini sesuai untuk pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Masyarakat dapat menerima keuntungan dengan adanya program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini.

Tabel 7. Jumlah Wisatawan Obyek Wisata B-29 Desa Wisata Argosari Kabupaten Lumajang

Nomor	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2014	28.205
2	2015	41.683
3	2016	50.304
	Total Jumlah	120.192

Sumber :Data Kunjungan Wisata Obyek Wisata Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2016.

Dampak dari Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata terhadap kelompok sasaran terbukti dari membaiknya kehidupan masyarakat yang berada di desa wisata dan menjadikan desa tersebut mendapat pemasukan dari adanya obyek wisata yang ada pada desa wisata

tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Iya, salah satu contoh keberhasilan di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu itu dikembangkan oleh pokdarwis desa Sidomulyo, sekarang tidak hanya terkenal disini saja di luar negeri pun juga terkenal, buktinya kunjungan wisatawannya itu banyak dari mancanegara seperti dari Swedia, Australia dan lain-lain. Kemudian contoh lainnya di B29 itu pokdarwisnya dari desa Argosari itu kunjungan wisatawannya tidak diragukan lagi juga terkenal di dalam maupun luar negeri. Disana ojek-ojek juga mulai tumbuh, otomatis mereka akan mendapatkan omset atau pendapatan dari banyaknya wisatawan yang datang, itu jelas meningkatkan perekonomian masyarakat dan otomatis membentuk kesejahteraan masyarakat.”
(wawancara pada tanggal 28 september 2017)



Gambar 7 : Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Wisata Sido Mulyo
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Fasluqi, Staf Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Menurut saya program ini sudah mendapat aspirasi, sudah menarik minat masyarakat untuk menggeluti dunia pariwisata. Saya contohkan seperti desa Sidomulyo, sudah merasakan bagaimana manisnya pariwisata sehingga berdampak positif bagi warga sekitar yang awalnya mereka tidak terlalu guyub akhirnya

menjadi guyub. Secara ekonomi juga yang awalnya banyak yang kekurangan sekarang sudah bisa mendapat pendapatan dari situ kan dapat dibuat kesimpulan bahwasanya desa wisata ini sudah mulai bergerak dan dampak positif dapat dirasakan masyarakat. Contohnya yang awalnya hanya petani salak sekarang sudah menjadi pengusaha keripik salak dimana itu juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas bagi wisatawan.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa banyak keuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Antusias sebagian masyarakat juga tinggi terkait pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Selain itu, beberapa desa juga ingin menjadi desa wisata karena melihat keuntungan yang di dapat dengan menjadi desa wisata sangat banyak. Hal tersebut merupakan bentuk kesesuaian antara program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata sesuai dengan kelompok sasaran masyarakat Kabupaten Lumajang dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata sebagai upaya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang.



Gambar 8 : Obyek Wisata Pemandian Waterpark Desa Wisata Wonorejo
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Tabel 8. Daftar Desa Wisata Kabupaten Lumajang

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
1	Lumajang	Kelurahan Ditotrunan	Kelurahan Jogotrunan Kelurahan Citrodiwangsan Kelurahan Rogotrunan
2	Sukodono	Desa Kutorenon	Desa Bondoyudo Desa Dawuhan Lor Desa Selok Besuki
3	Kedungjajang	Desa Wonorejo	Desa Umbul Desa Pandansari Desa Krasak
4	Klakah	Desa Tegalrandu	Desa Ranupakis Desa Papringan Desa Klakah
5	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali	Desa Ranuyoso Desa Tegalbangsri Desa Wates Wetan
6	Randuagung	Desa Ranuwurung	Desa Ranulogong Desa Salak Desa Ledoktempuro Desa Kalipenggung Desa Randuagung
7	Jatiroto	Desa Jatiroto	Desa Kaliboto Desa Rojopolo Desa Kaliboto Kidul Desa Sukosari Desa Banyuputih Kidul
8	Padang	Desa Tanggung	Desa Merakan Desa Kalisemut Desa Padang Desa Bodang Desa Mojo
9	Senduro	Desa Argosari	Desa Ranupani Desa Kandangtepus Desa Burno Desa Senduro Desa Kandangan
10	Pasrujambe	Desa Pasrujambe	Desa Sukorejo Desa Jambekumbu Desa Karanganom
11	Tempeh	Desa Jokarto	Desa Pulo
12	Pasirian	Desa Selok Awar-awar	Desa Bago Desa Condro Desa Gondoruso

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
			Desa Nguter Desa Pasirian
13	Pronojiwo	Desa Sidomulyo	Desa Pronojiwo Desa Tamanayu Desa Sumberurip Desa Oro-oro Ombo Desa Supiturang
14	Candipuro	Desa Sumbermujur	Desa Penanggal Desa Sumberwuluh Desa Tambahrejo Desa Kloposawit
15	Tempursari	Desa Bulurejo	Desa Tegalrejo Desa Tempurejo Desa Tempursari Desa Purorejo Desa Pundungsari Desa Kaliuling
16	Kunir	Desa Jatimulyo	Desa Jatirejo Desa Jatigono Desa Kunir Kidul Desa Kabuaran Desa Kedungmoro
17	Tekung	Desa Wonokerto	Desa Karangbendo Desa Klampokarum Desa Tekung Desa Tukum
18	Rowokangkung	Desa Sidorejo	Desa Rowokangkung Desa Kedungrejo Desa Summersari
19	Yosowilangun	Desa Wotgalih	Desa Kraton Desa Krai Desa Tunjungrejo
20	Gucialit	Desa Guccialit	Desa Kenongo Desa Pakel Desa Wonokerto Desa Kertowono Desa Dadapan
21	Sumbersuko	Desa Purwosono	Desa Petahunan Desa Sentul

Sumber : Data Desa Wisata di Kabupaten Lumajang

b. Organisasi Pelaksana (Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana)

Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang merupakan program yang diamanahkan Peraturan Daerah no. 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penerapan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini juga dibuat Peraturan Bupati Lumajang nomor 79 tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang. Penanggung jawab program ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang:

“Kalau untuk programnya siapa itu dari perda no 1 th 2014 tentang RPJMD dan dari Peraturan Bupati Lumajang nomor 79 tahun 2014 tentang destinasi wisata satu kecamatan satu desa wisata di Kabupaten Lumajang. Pertama itu ada 9 program nah yang berikutnya ditambah 4 yaitu nawacita dan salah satunya adalah pariwisata sama Pak Bupati kemudian dimasukkan dalam perda no 1 th 2014 tentang RPJMD. Sedangkan untuk penanggung jawabnya adalah *Leading Sector*, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Dalam proses pelaksanaannya kita koordinasi lintas sektoral.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang tidak bisa terlepas dari peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang adalah bertindak sebagai pembina, dan regulator. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lumajang juga memanager pariwisata dan kebudayaan yang bisa dipariwisatkan di Kabupaten Lumajang. Hal ini sesuai yang di ungkapkan oleh Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara:

“Pertama sebagai pembentuk dan penanggung jawab. Kalau sekarang sebagai pembina yaitu membina SDMnya, sekarang ada kasi kelembagaan dan SDM. Disitu tugasnya khusus membina usaha pariwisata salah satunya ada POKDARWIS. Selain pembina yaitu regulator, kaitanya dengan peraturan-peraturan yang ada di desa wisata.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Sedangkan Bapak Edi selaku Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyampaikan sebagai berikut:

“Apa peran dinas pariwisata itu, kita sebagai institusi yang mengurus masalah managemenya. Jadi tidak selalu kita yang mengerjakan, bisa orang atau dinas lain yang mengerjakannya. Jadi disini dinas pariwisata menangani pariwisata itu sendiri dan kebudayaan. Budaya ini yang dimaksudkan adalah budaya yang bisa dipariwisatkan.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana program tidak memberikan pelayanan langsung kepada wisatawan, melainkan memberikan dorongan kepada masyarakat agar membentuk suatu kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan kepariwisataan di masing-masing desa.



Gambar 9 : Festival Kuda Kencak pada HUT Kabupaten Lumajang
 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini juga dalam hal kepromosian. Kegiatan promosi ini dilakukan agar desa wisata dan destinasi wisata yang ada, dapat dikenal dan diketahui masyarakat secara luas. Bentuk promosi ini bisa dalam bentuk website, pameran atau event-event, videotron dan media-media promosi yang lain. Sosialisasi dan promosi wisata baru dan unggulan dapat dikatakan adalah langkah yang sangat penting dalam modal pembangunan pariwisata, karena secara tidak langsung akan memperkenalkan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata yang menarik dikunjungi. Hal ini seperti yang diutarakan Bapak Fasluki selaku Staf Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Promosi yang dilakukan oleh kita mengandalkan website tentunya, website kita sudah baru. Yang kedua, kita aktif ikut beberapa pameran yang diadakan diberbagai tempat. Baik itu berskala internasional, nasional, maupun lokal. Selanjutnya kita mempromosikan lewat videotron yang sudah ada di jalan-jalan Kabupaten Lumajang, stasiun dan tempat ramai lainnya.”
 (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Selain hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program ini tidak bisa terlepas dari koordinasi dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program itu sendiri seperti, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan lain-lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara :

“Keberadaan dari dinas itu turut memanager atau mengurus bagaimana keinginan pemerintah yang sudah disadari bahwa pariwisata itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa terwujud. Dalam proses pelaksanaannya kita koordinasi lintas sektoral seperti dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, UKM. Contoh ketika ada pengembangan di B29 misalnya jalannya kurang bagus, lalu diprogramkan untuk membangun jalan tapi karena membangun jalan bukan tugas dari Dinas Pariwisata tapi tugas dari dinas Pekerjaan Umum maka kita memanagernya dengan kerja sama dengan Dinas PU. Jadi anggarannya tetap masuk dalam Dinas PU tetapi yang membutuhkan adalah kita Dinas Pariwisata.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Bapak Fasluksi selaku staf Bidang Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Dalam hal transportasi khusus, kami bekerja sama dengan pihak swasta khususnya Travel Agent. Walaupun biaya tarifnya mahal dikarenakan mereka mengejar untung, tetapi pelayanan yang mereka berikan sangat bagus jadi terasa tidak mengecewakan. Kadang kala ada funtrip seperti Widya Wisata yang mengantarkan siswa berkeliling ke salah satu obyek wisata guna mengenalkan secara detail obyek wisata tersebut.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Hal kepromosian Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luamajng juga berkerja sama dengan pihak lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fasluki selaku staf Bidang Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Kita dari pihak dinas dalam melakukan promosi dan pemasaran menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak organisasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), majalah KIRANA dan waktu dekat ini mas kami berencana mendatangkan ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia). Intinya bentuk hubungan kerjasama ini, kami dapat lebih mudah mempromosikan desa wisata dan obyek wisatanya yang kami miliki. Karena menurut kami langkah promosi ini dinilai dapat memberikan dampak yang besar untuk pembangunan pariwisata kedepanya”. (wawancara pada taggal 28 september 2017)



Gambar 10 : Logo ASITA
Sumber : Asitaindonesia.org

Selain hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya juga memberikan fasilitas berupa dana. Dana tersebut digunakan untuk membantu atau membuat fasilitas apa yang dibutuhkan di dalam desa wisata. Dana ini diberikan secara bertahap setiap tahun tetapi

tidak semua desa wisata mendapatkannya. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan Bapak Iwan sataf bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara :

“Kita mulai desa wisata terbentuk 2014 sampai sekarang kita selain membina kita juga memberikan bantuan keuangan khusus tetapi tidak semuanya yaitu dengan cara bertahap. Tahun 2015 itu desa wisata Sumberpujon dapat bantuan uang yang digunakan untuk pembangunan jalan. Kemudian 2016 kita ada 3 desa yang dapat bantuan berupa keuangan juga yaitu desa Ranu Bedali, desa Wot Gale, dan desa Penanggal. Tahun ini ada 5 desa yaitu, desa Tegal Randu, Gucialit, Sido Mulyo, Sido Rejo dan Wotgale dapat bantuan keuangan. Jadi selain pembinaan yang kita berikan adalah bantuan keuangan khusus. Tahun depan juga disusulkan lagi berganti desa”. (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sangat penting dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Berbagai kerjasama juga dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pihak lain. Hal tersebut dilakukan agar lancarnya implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam upaya pembangunan sektor pariwisata. Hal tersebut merupakan bentuk kesesuaian antara program Satu Kecamatan dengan organisasi pelaksana yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata sebagai upaya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang.

c. Kelompok Sasaran/Pemanfaat (Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana)

Pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini membutuhkan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang tentunya. Selain peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga membutuhkan peran dan kerjasama dari masyarakat Kabupaten Lumajang. Hal itu dikarenakan masyarakat harus mampu mengelola dan membangun desa wisata yang sudah terbentuk demi meningkatnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang dalam hal ini melalui Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Hal itu terlihat dari wawancara dengan Bapak Iwan Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada tanggal 28 september 2017 sebagai berikut:

“Pertama kita ingin melibatkan masyarakat Kabupaten Lumajang untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lumajang. Jadi keterlibatan masyarakat aktif didesa wisata itu yang kita butuhkan. Kemungkinan disana nanti masyarakat yang awalnya mereka itu bekerja sebagai petani, tetapi nanti mereka memiliki jalinan-jalinan industri pariwisata nanti mereka juga bisa membuat batik membuat oleh-oleh dan lain sebagainya kemudian juga bisa bekerja bersama mengelola suatu tempat menjadi suatu destinasi wisata. Kedua yaitu, pariwisata berbasis kearifan lokal, selain punya daya tarik wisata, kearifan lokal di bidang seni budaya itu yang kita angkat. Jadi sesuai dengan visi misinya Dinas Pariwisata sendiri yaitu terwujudnya daerah tujuan wisata yang berbasis kearifan lokal. Desa wisata itu dinilai bagi kami yang paling cocok dalam memajukan potensi wisata yang ada di Kabupaten Luamajang.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)



Gambar 11 : Air Terjun Kapas Biru di Desa Wisata Sido Mulyo
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Berdasarkan pendapat Bapak Iwan diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ingin melibatkan masyarakat Kabupaten Lumajang untuk bersama-sama membangun pariwisata Kabupaten Lumajang. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang itu salah satunya melalui Program Satu Kecamatan Saatu Desa Wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam hal ini ingin agar masyarakat mampu membentuk desa wisata di desanya dengan sesuatu yang menarik di desa tersebut seperti, alam yang indah, budaya atau adat istiadat yang khas yang ada di desa tersebut. Berdasarkan hal itu Dinas Pariwisata membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di setiap desa wisata sebagai pelaku dalam membangun dan mengelola desa wisata tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Dalam penerapan program ini kami (Disbudpar) membentuk POKDARWIS sebagai bentuk kerjasama kami dengan masyarakat di desa wisata. Sejauh ini Sudah ada 21 POKDARWIS pada 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Jadi, POKDARWIS ini sebagai pelakunya di desa wisata.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Tabel 9. Data POKDARWIS di desa wisata Argosari

1	Nama POKDARWIS	Argosari B29
2	Alamat Sekertariat	Desa Argosari
3	Waktu Pembentukan	1 Januari 2013
4	Kepengurusan: a. Penasehat b. Ketua Pokdarwis c. Wakil Ketua d. Sekertaris e. Bendahara f. Seksi-seksi: <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan & Ketertiban • Kebersihan & Keindahan • DTW & Kenangan • Humas & Pengembangan SDM • Pengembangan Usaha 	Kepala Desa (Ismail) Budianto, S.Pd. H Darsono Bambang Budianto Misnoto, Sulikin Wandu Purwanto Ngatari Wawan Irawan Asstoko Yanti
5	Jumlah Anggota	18 Orang

Sumber: Data Pokdarwis Desa Wisata Argosari

POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah dan kenangan) dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi pariwisata.



Gambar 12 : Obyek Wisata Hutan Bambu Desa Wisata Sumber Mujur
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang selain membentuk POKDARWIS tersebut juga membina mereka agar masyarakat mengerti akan pentingnya pariwisata dan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan desa wisata mereka. Pembinaan POKDARWIS ini diharapkan mampu membangun sumber daya manusia dari desa wisata sehingga desa wisata tersebut maju dan dikenal dalam rana nasional maupun internasional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Lumajang juga berharap dengan dibentuk dan dibinanya POKDARWIS ini dapat mengangkat pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Iwan selaku staf bidang sarana wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara sebagai berikut:

“Setelah Desa wisata dibentuk, kemudian tahun 2015, 2016 yang sudah kita lakukan adalah pembinaan. Pada 2016 kemarin kita melakukan pembinaan 2 kali dalam setahun, yang pertama dilakukan di aula Pondok Asri dan yang kedua di Aula Ranu Klakah. Kita rutin melakukan itu, makanya di tahun 2015 kita juga keliling kecamatan-kecamatan melakukan pembinaan dari sisi Pokdarwisnya. Desa wisata itu lembaganya, pokdarwis itu pelakunya jadi pelakunya yang kita bina. Setiap kecamatan itu wajib ada desa wisatanya dan ada pokdarwisnya. Saat ini sudah terbentuk 21 desa wisata dan 21 pokdarwis pada 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini selain terbantu dengan adanya Pokdarwis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga perlu kerjasama dan bantuan dari masyarakat luas. Terutama masyarakat yang desanya menjadi desa wisata karena masyarakat harus sadar akan pentingnya pariwisata seperti keamanan, keindahan, kebersihan dan lain-lain. Demi tercapainya tujuan dari implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam upaya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melakukan pelatihan kepada masyarakat. Masyarakat dilatih agar dapat membangun dan memajukan desa wisatanya dan yang ingin membuat desa wisata. Agar

mereka bisa mengerti apa yang harus dilakukan sehingga dapat membentuk dan memajukan suatu desa wisata. Hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan staf bidang sarana wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara sebagai berikut:

“Pelatihannya berupa pembinaan. Kemudian ketika ada event-event baik itu dari Provinsi atau Kementrian itu kita selalu mengikutsertakan mereka, contoh pelatihan pariwisata, ada upaya sertifikasi wisata. Ada lagi pelatihan yang diadakan provinsi tentang pengelolaan daya tarik wisata. Dari kita sendiri pembinaan SDM, pemberian motivasi dan kita fasilitasi. Pelatihan bahasa inggris pernah yang di Tumpak Sewu, ada juga pelatihan kuliner yaitu pelatihan mengelola menu sarapan pagi di desa wisata.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Selain pembinaan dan pelatihan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga memberikan dana kepada desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Dana tersebut diberikan untuk membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa wisatanya. Pemberian dana tahun 2016 diberikan kepada lima desa sesuai yang diungkapkan Bapak Iwan selaku staf bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyampaikan sebagai berikut:

“Dana untuk desa wisata tahun ini ada Rp. 1.300.000.000,00 pembagiannya tidak sama. Wot gale itu dpat 300 juta, Tegal Randu dapat 400 juta, Gucialit dapat 150 juta, Sidomulyo dapat 300 juta dan Sidorejo dapat 150 juta. Peruntukanya juga beda-beda, tergantung kebutuhan dari desa itu apa, yang di Gucialit butuh gapuro selamat datang, Tegal Randu butuh warung apung nanti itu desember dieksekusi. Wotgale butuh paving untuk jalan, kemudian Sidorejo butuh arena sirkuit cross, dan Sidomulyo butuh loket, boot dan perluasan parkir”. (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Masyarakat desa wisata juga harus mampu mengembangkan dan mengelola desa wisatanya. Agar wisatawan tertarik untuk datang ke desanya dan mendatangkan keuntungan bagi desa dan masyarakat.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata.

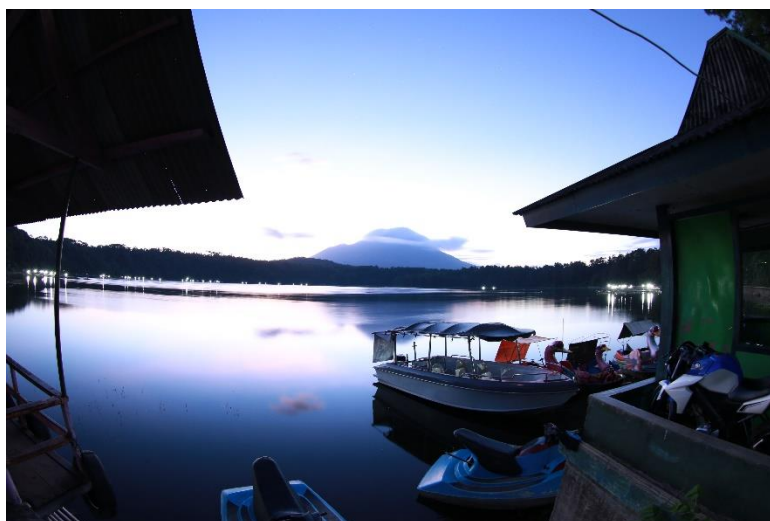
a. Faktor Pendukung

1) Dana

Dana merupakan salah satu hal penting untuk keberhasilan suatu program, dana dibutuhkan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Dalam program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini dana sudah tersedia. Walaupun dana tersebut tidak diberikan kepada seluruh desa wisata karena terlalu banyak jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang tapi dana tersebut setiap tahun selalu ada dan jumlahnya cukup untuk diberikan ke beberapa desa. Desa wisata yang diberi dana juga diatasi dengan diberikan bergantian setiap tahunnya agar pembagian dana dapat merata ke seluruh desa wisata. Dana tersebut sangat berguna khususnya untuk pembangunan fasilitas yang ada di desa wisata. Bapak Iwan staf bidang

sarana wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa:

“Dari sisi anggaran kita itu juga tersedia untuk melaksanakan pembinaan, pembangunan dan dukungan infrastruktur desa wisata tersebut mas. Jadi anggaran tersebut dapat menjadi dukungan bagi kita untuk membangun desa wisata yang ada di Lumajang ini.”
(wawancara pada tanggal 28 september 2017)



Gambar 13 : Obyek Wisata Ranu Klakah Desa Wisata Tegalrandu
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Dana untuk desa wisata tahun 2016 jumlahnya Rp 1.300.000.000.00. dana tersebut sangat membantu dalam pembangunan pariwisata atau desa wisata di Kabupaten Lumajang. Dana dalam program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata biasanya digunakan untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan di desa wisata terkait seperti akses jalan, toilet, dan lain-lain. Dana tersebut juga tidak dapat diberikan kepada seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Namun, agar tetap merata dana dibagi ke desa wisata yang berbeda setiap tahunnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Iwan staf bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

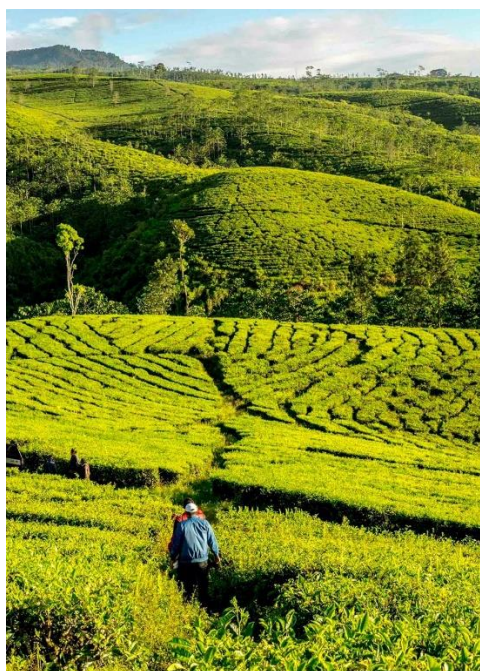
“Dana untuk desa wisata tahun ini ada Rp. 1.300.000.000,00 pembagiannya tidak sama. Wot Gale itu dapat 300 juta, Tegal Randu dapat 400 juta, Gucialit dapat 150 juta, Sidomulyo dapat 300 juta dan Sidorejo 150 juta. Peruntukannya juga beda-beda, tergantung kebutuhan dari desa itu apa, yang di Gucialit butuh gapuro selamat datang, Tegal Randu butuh warung apung nanti itu desember dieksekusi. Wotgale butuh paving untuk jalan, kemudian Sidorejo butuh arena sirkuit cross, dan Sidomulyo butuh loket, boot dan perluasan parkir” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan program desa wisata ini, salah satunya dengan dukungan dana. Dana merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu program, karena dana dapat digunakan untuk membiayai segala kebutuhan sarana prasarana dan operasional dalam program desa wisata ini. Oleh karena itu selain potensi wisata yang dimiliki masing masing desa wisata, dana juga menjadi faktor penting demi keberhasilan pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini.

2) Sumber Daya Alam

Kabupaten Lumajang mempunyai potensi alam yang beraneka ragam. Kabupaten Luamajang memiliki gunung, danau dan laut. Sehingga potensi dari darat dan air lengkap dan tersedia di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut sangat mendukung dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Jadi masyarakat atau pemerintah tidak perlu bingung untuk menemukan suatu potensi wisata yang dapat dijadikan destinasi pariwisata. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Potensinya itu luar biasa, di Lumajang itu mulai yang kering sampai yang berair itu ada. Yang berair, sepanjang garis selatan perbatasan kita itu laut. Selain dikenal dengan potensi pasirnya juga dikenal tempat wisatanya. Jadi, mulai dari Wot Gale yang paling timur sampai ke pantai Watu Godek yang paling barat. Kemudian, ada segiriga ranu, mulai dari ranu Bedali, ranu Klakah dan ranu Pakis. Ada lagi ranu Pane, ranu Regulo dan ranu Kumbolo. Sekarang air terjun mulai dari Tumpak Sewu, Kapas Biru, dll. Untuk keringnya, contohnya bukit B29 dll. Itu artinya ini cukup sebagai bahan untuk membangun pariwisata di Kabupaten Lumajang.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)



Gambar 14 : Obyek Wisata Kebun Teh Desa Wisata Gucialit
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Banyaknya potensi wisata dan keindahan alam tersebut juga membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam mengenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut mempermudah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam melakukan promosi tentang pariwisata di Kabupaten Lumajang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Fasluqi dalam wawancara :

“Kabupaten Lumajang kan punya pantai, ada gunung, dan berbagai wisata yang ada dibandingkan beberapa kota yang ada di Jawa Timur lainnya. Inilah faktor pendukung yang dapat dikembangkan dan menjadi nilai *plus* ...terlebih lagi di era yang serba internet dan perkembangan teknologinya cepat. Faktor ini dapat menjadi peluang bagi kami untuk mempromosikan ke dunia luar bahwa Kabupaten Lumajang memiliki keberagaman obyek wisata dan daya tarik yang tidak kalah dengan daerah lainnya.” (wawancara pada tanggal 28 September 2017)

Tabel 10. Daya Tarik Wisata Desa Wisata Argosari Kec. Senduro

DAYA TARIK WISATA	ADA / TIDAK	KETERANGAN
a. Daya Tarik Wisata Alam	ADA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puncak B.29 Argosari ➤ View Pura MGSA ➤ Air Terjun Manggisan ➤ Air Terjun Sobyok ➤ Ranu Pane ➤ Ranu Regulo ➤ Ranu Kumbolo
b. Daya Tarik Wisata Buatan	ADA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tempuran Tubing Adventure ➤ Sentul City
c. Daya Tarik Wisata Khusus / Lainnya	ADA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seni Kuda Kepang ➤ Seni Ujung

Sumber : Data Potensi Kepariwisata diwilayah Kerja Pokdarwis

Berdasarkan penjelasan diatas, sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Keberagaman obyek wisata, banyaknya potensi wisata yang dapat dijadikan sebuah destinasi wisata merupakan hal yang dapat membangun dan mengembangkan kondisi pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Masyarakat dan pemerintah menyadari potensi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang dapat

meningkatkan pariwisata Kabupaten Lumajang dan perekonomian masyarakat sekitar.

b. Faktor Penghambat

1) Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan membangun wisata yang ada di Kabupaten Lumajang menjadikan hambatan pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang. Kurangnya kesadaran ini berasal dari masyarakat desa wisata sendiri maupun pengunjung. Memang sebagian masyarakat sadar akan pentingnya pariwisata namun ada juga masyarakat yang kebiasaannya dan kesadarannya kurang dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan staf bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bahwa:

“Faktor penghambat dari sisi masyarakat bahwa tidak semua masyarakat desa itu yang benar-benar mengerti betapa mahalny sebuah pariwisata. Salah satu contoh pernah terjadi di salah satu desa wisata itu kan desa wisata dibangun dengan Saptapesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan nyaman), salah satunya adalah aman ternyata masih ada saja pengunjung yang kehilangana sepeda motor, itu kan berarti dari sisi SDM sebagian masyarakat masih ada yang belum mengerti sisi pentingnya saptapesona dalam mengembangkan desa wisata. (wawancara pada taggal 28 september 2017)

Hal ini didukung oleh pendapat Bapak Edi Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang mengatakan bahwa:

“Memang masih ada perilaku yang masih belum sepenuhnya bisa menjadi perilaku andalan untuk pengembangan pariwisata. Salah satunya contoh kalau ke B29 itu ojek, misalnya naik ojek 100ribu karena yang naik orang asing *diantem* 300ribu. Ada juga tukang ojek yang melayani jasa ojeknya di luar tempat yang disediakan dan harganya pun beda dengan peraturan yang ada. Sehingga hal tersebut membuat bingung dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Tetunya juga saling merugikan antar jasa ojek”. (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Dari hasil wawancara diatas kurangnya kesadaran pelaku jasa ojek dalam melayani wisatawan dan perilaku masyarakat desa wisata menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang. Selain hal tersebut ada juga desa wisata yang perkembangannya sangat sedikit bahkan hampir tidak berkembang. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau antusias masyarakat dalam membangun dan mengelola desa wisatanya. Seperti yang diungkapkan Bapak Fasluki staff bidang pemasaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Dari 21 desa wisata tersebut kita tidak menutup diri memang ada yang antusiasnya baik, tetapi itupun tidak semua, ada beberapa desa yang perkembangannya stagnan begitu-begitu saja. Itu kan disebabkan karena kesadaran masyarakat yang tidak paham akan pentingnya wisata dan antusias masyarakat yang kurang dalam membangun desa wisatanya.” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Tabel 11. Contoh Kurangnya Daya Tarik Wisata di Desa Wisata Ranuwurung Kecamatan Randuagung

DAYA TARIK WISATA	ADA / TIDAK	KETERANGAN
a. Daya Tarik Wisata Alam	ADA	Candi Randuagung
b. Daya Tarik Wisata Buatan	TIDAK	
c. Daya Tarik Wisata Khusus / Lainnya	ADA	➤ Seni Jaran Kencak ➤ Ludruk Tunas Muda
d. Jumlah Wisatawan Tahun 2016	ADA	4.822

Sumber : Data Potensi Kepariwisata di wilayah Kerja Pokdarwis

Perkembangan dan kemajuan desa wisata ditentukan oleh semangat dan antusias masyarakat dalam membangun desa wisata. Kurangnya kesadaran atau antusias masyarakat ini tentunya dapat merugikan bagi perkembangan desa wisatanya. Jika hal tersebut terus terjadi akan menyebabkan desa wisata yang ada di desa tersebut sepi pengunjung dan tidak memperoleh keuntungan atau pendapatan. Hal ini tentunya menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang.

2) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana akan mendukung berjalanya implementasi sebuah program. Sarana dan prasarana yang ada di desa wisata Kabupaten Lumajang masih banyak yang kurang. Seperti akses jalan, masih banyak yang sulit, tidak tersedianya toilet dan tempat parkir,

dan lain-lain. Hal itu menyebabkan desa wisata sulit untuk dikunjungi dan wisatawan malas untuk berkunjung lagi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fasluki Staff Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Dari analisa yang sering kami dapat dilapangan yang pertama itu infrastruktur utamanya jalan, kemudian fasilitas seperti toilet dan kenyamanan wisatawan di tempat pariwisata. Banyak desa wisata itu yang aksesnya dan fasilitasnya apa adanya mas. Seperti di kapas biru, itu jalanya sulit dan masih menggunakan bantuan bambu-bambu yang dibuat masyarakat sekitar. Tapi kami (Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Lumajang) akan berusaha membantu untuk menyelesaikan masalah infrastruktur” (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Sarana dan prasarana yang sudah tersedia juga ada yang rusak karena tidak dirawat dengan baik. Hal tersebut kembali karena faktor masyarakatnya yang kurang akan kesadarannya. Pelaksanaan program ini juga perlu peran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana. Pihak pemerintah juga sudah berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada di setiap desa wisata dan obyek wisata. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Kemudian dari sarana dan prasarana. Jeleknya sarana dan prasarana ini terjadi karena faktor alam maupun SDM yang ada. Karena ada sarana prasarana yang rusak karena ulah individu yang tidak bertanggung jawab, seperti mencoret-coret, buang sampah sembarangan dan tidak menjaga sarana yang ada. Kami jelasnya melakukan evaluasi ke berbagai obyek wisata, guna memantau kekurangan dan kondisi fasilitas yang ada seperti tempat parkir, rest area, kamar mandi serta fasilitas yang lainnya”. (wawancara pada tanggal 28 september 2017)

Tabel 12. Daftar Fasilitas yang terdapat di Desa Wisata Argosari.

FASILITAS PENDUKUNG WISATA	ADA / TIDAK
a. Penginapan/Homestay	ADA
b. Warung Makan	ADA
c. Toko Cenderamata	
d. Balai Pertemuan	ADA
e. Peta & Tanda Informasi Wisata	ADA
f. Toilet Umum	ADA
g. Area Parkir	ADA
h. Tempat Sampah	ADA
i. Jaringan Telekomunikasi	ADA
j. Jaringan Listrik	ADA
k. `Lainnya	

Sumber : Data Pokdarwis Desa Wisata Argosari

Terdapat banyak desa wisata yang fasilitasnya belum terpenuhi hal ini karena pemerintah tidak membantu dalam pembuatan fasilitas tersebut. Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana ini tentunya menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk datang ke desa wisata. Hal itu karena fasilitas adalah hal yang penting yang harus ada di dalam desa wisata. Lengkapnya sarana dan prasarana di sebuah desa wisata tentunya membuat kondisi desa wisata nyaman, dan hal tersebut membuat banyak wisatawan datang yang akan memberi keuntungan bagi desa dan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mas Faris selaku pengunjung Obyek Wisata B-29 desa wisata argosari:

“B-29 ini pemandangannya bagus mas. Hawanya juga enak dingin. ... kalo untuk fasilitasnya, tempat parkirnya menurut saya agak jauh mas. Kalo bisa kayak di Paralayang di Malang itu mas dekat, jadi enak gak perlu capek-capek kalo naik. Apalagi kalau parkir mobil, itu lebih jauh dari parkir sepeda motor mas”. (wawancara pada tanggal 3 oktober 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas, sarana dan prasarana yang kurang ini disebabkan karena pemerintah belum membantu desa wisata terkait dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengelola, merawat dan menjaganya. Hal tersebut membuat sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang.

C. Analisis Data Penelitian

David Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa program dapat dikatakan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola tersebut diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

1. Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lumajang.

a. Program (Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat)

Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran (pemanfaat) yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Dalam inti unsur yang pertama yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat dapat pula dikatakan kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran dalam sebuah implementasi program. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, antara program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dan kelompok sasaran (masyarakat) sudah saling berhubungan dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Program ini dibentuk sebagai usaha Pemerintah untuk membangun pariwisata di Kabupaten Lumajang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program merupakan alat (instrumen) kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi/lembaga masyarakat.

Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini dibuat dengan menampilkan sesuatu yang menarik di dalam suatu desa. Hal menarik tersebut tidak harus keindahan alam tetapi juga bisa budaya dan adat istiadat yang ada di desa seperti jaran kencak, perayaan ogoh-ogoh, dan lain-lain. Sesuatu yang seperti itu bisa menjadi daya tarik dalam sebuah desa wisata. Senada dengan Fandeli (2002:13) menjelaskan bahwa desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya. Hal ini membuat Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata cocok di terapkan di Kabupaten Lumajang melihat

Kabupaten Lumajang tidak hanya memiliki potensi alam tetapi juga budaya dan adat istiadat seperti B-29 yang sering diadakan penampilan tari tradisional, dan Kuda Kencak yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Soetarso dan Mohamad (2001:35), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan salah satunya adalah Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.

Pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. Antusias masyarakat juga sangat tinggi karena program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini dapat menguntungkan desa. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Iwan selaku Staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada wawancara 28 september 2017 bahwa respon Masyarakat baik terkait program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Banyak desa yang ingin menjadi desa wisata juga dan pada akhirnya membangun desanya. Antusiasme desa-desa lain ikut berkembang seperti desa Bades dengan pantai Damparnya, desa Condro yang punya gunung Tambu, desa – desa tersebut ingin menjadi desa wisata. Selain itu masyarakat desa wisata juga terbantu dalam aspek ekonomi, karena masyarakat dapat memperoleh mata pencaharian seperti bekerja atau berjualan di desa wisata. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Mazmanian dan Sabatier dalam

Widodo (2001:192) implementasi ialah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Keberhasilan dari pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa ini terhadap masyarakat dan desanya salah satu contohnya adalah di desa wisata Sidomulyo dan Argosari. Sesuai dengan wawancara 28 september 2017 dengan Bapak Iwan staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang di desa wisata Sidomulyo obyek wisata yang paling digemari wisatawan adalah air terjun Tumpak Sewu dan di desa Argosari yaitu B-29. Wisatawan yang datang ke desa Sidomulyo maupun Argosari tidak hanya wisatawan lokal banyak juga yang dari manca negara. Banyaknya wisatawan yang datang ke desa tersebut membuat masyarakat merasakan langsung keuntungan dari adanya program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Ibu Sulis salah satu penduduk desa wisata Argosari juga mengungkapkan bahwa sejak desa Argosari menjadi desa wisata banyak orang yang datang ke desa argosari, sehingga banyak masyarakat desa Argosari yang berjualan, membuat penginapan dan menjadi ojek. Masyarakat yang bekerja, dan berjualan di desa wisata menjadi terbantu dari aspek ekonomi dibandingkan sebelum adanya desa wisata. Hal tersebut sesuai dengan tabel. 7 Jumlah Wisatawan Obyek Wisata B-29, bahwa wisatawan yang datang ke obyek wisata puncak B-29 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2014 berjumlah

28.205 wisatawan, tahun 2015 berjumlah 41.683 wisatawan dan ditahun 2016 berjumlah 50.304 orang. Jumlah tersebut berdasarkan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang yang menjadi wujud dari pembangunan sektor pariwisata. Pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini mampu meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat akan pentingnya pariwisata dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Selain itu, pelaksanaan program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. Perwujudan keuntungan dari program ini adalah dengan meningkatnya kondisi ekonomi masyarkat desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang dengan adanya dampak dari pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

b. Organisasi Pelaksana (Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana)

Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Inti dari unsur kedua adalah kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Berdasar pendapat diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana implementasi program. Hal ini disebabkan apabila organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat.

Jones dalam Usman (2002:28) juga menyebutkan berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana program merupakan unsur yang penting dalam proses implementasi program. Organisasi pelaksana dalam program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai organisasi pelaksana berperan penting demi lancarnya implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

Peran dinas pariwisata meliputi sebagai pembina dan pemberi fasilitas/dana. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Iwan selaku staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara 28 september 2017 bahwa peran sebagai pembina Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas membina atau melakukan pelatihan-pelatihan kepada Pokdarwis dan masyarakat terkait pembangunan desa wisata. Pelatihan atau pembinaan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang contohnya adalah

pelatihan pengelolaan daya tarik wisata dan pembinaan kepada Pokdarwis di setiap desa wisata. Pelatihan dan pembinaan tersebut dilakukan, merupakan salah satu langkah agar program berjalan lancar dan sesuai target yang ditentukan.

Sedangkan peran dalam pemberian fasilitas yaitu pemberian fasilitas berupa pemberian dana dimana dana tersebut nanti dipakai untuk pembuatan fasilitas sesuai yang dibutuhkan oleh desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Seperti pemberian dana kepada desa Gucialit dan Wotgale yang membutuhkan pembangunan gapura selamat datang dan paving. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Syukur (1987:389), proses dalam suatu implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan serta
- c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Selain yang tersebut diatas, peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga untuk memperkenalkan desa wisata – desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang, hal itu dilakukan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fasluki selaku staf Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bahwa promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang salah satunya dengan

mengandalkan website. Kemudian aktif ikut beberapa pameran yang diadakan diberbagai tempat. Promosi juga dilakukan lewat videotron yang ada di jalan-jalan Kabupaten Lumajang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terkoordinasi dengan Dinas dan pihak lain terkait pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Hal ini sesuai yang dikatakan Bapak Edi Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara bahwa saat pembangunan akses jalan di desa wisata, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Dinas Pembangunan Umum, contohnya pada saat pembangunan jalan di obyek wisata B.29. Kemudian terkait pembuatan UMKM di desa wisata maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Dinas Koperasi atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Bapak Fasluki staf bidang Pemasaran juga menambahkan dalam hal transportasi khusus, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan pihak Travel Agent. Masalah promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), dan ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia).

Berdasarkan penjelasan diatas tentang kesesuaian antara organisasi pelaksana yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Disini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang memiliki

beberapa peran dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Peran tersebut antara lain sebagai pembina, pemberi fasilitas, dan pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan tujuan lancar dan berhasilnya pelaksanaan program ini.

c. Kelompok Sasaran (Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana)

Korten dalam Tarigan (2000: 12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Unsur ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola tersebut diatas dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian salah satunya antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana.

Hal ini disebabkan apabila syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Menurut teori Korten inti dari unsur ketiga dalam pelaksanaan program yaitu kelompok sasaran. Kelompok sasaran pada program Satu Kecamatan Satu Desa

Wisata ini adalah masyarakat Kabupaten Lumajang. Dimana masyarakat Kabupaten Lumajang juga harus ikut berperan dalam pelaksanaan program ini agar mendapat keuntungan dari adanya program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

Bentuk kesesuaian antara kelompok sasaran yaitu masyarakat dengan organisasi pelaksana yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang adalah adanya kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan Masyarakat Kabupaten Lumajang. Selain hal itu Dinas Pariwisata dan Kabupaten Lumajang juga mengikutsertakan Masyarakat dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Masyarakat harus berperan dan mampu bekerja sama dalam implementasi program ini. Peran dan kerjasama masyarakat dibutuhkan karena pelaksanaan program ini dapat menguntungkan masyarakat sendiri. Hal ini sesuai yang diungkapkan Syukur (1987:389), proses dalam suatu implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan serta
- c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pendapat Syukur diatas menjelaskan proses dalam suatu implementasi harus terdapat kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil

dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Serta, harus ada organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan proses implementasi. Tanpa adanya dua hal tersebut yaitu kelompok sasaran dan organisasi pelaksana, program sulit untuk dilaksanakan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ingin melibatkan masyarakat Kabupaten Lumajang untuk bersama-sama membangun pariwisata Kabupaten Lumajang. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang itu salah satunya melalui pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ingin agar masyarakat mampu membentuk desa wisata dengan sesuatu yang menarik seperti alam yang indah, budaya dan adat istiadat yang khas. Kemudian masyarakat harus mampu mengelola, mengembangkan desa wisata tersebut sendiri sehingga desa wisata tersebut mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.

Bentuk perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini salah satunya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang beranggotakan masyarakat. POKDARWIS ini dibentuk di setiap desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Seperti yang diungkapkan Bapak Iwan staf Bidang Sarana Wisata Dinas Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara 28 september 2017 bahwa dalam pelaksanaan program

Satu Kecamatan Satu Desa Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang membentuk POKDARWIS sebagai bentuk Kerjasama dengan Masyarakat. POKDARWIS bertugas mengelola dan membangun desa wisatanya agar maju dan berkembang. Pembentukan POKDARWIS membuat masyarakat turun sendiri untuk membangun desa wisatanya dalam program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Saat ini dalam program ini sudah terbentuk 21 POKDARWIS dalam 21 desa wisata. Pembentukan POKDARWIS ini tujuannya adalah membangun sumber daya manusia dari desa wisata yaitu masyarakatnya sehingga desa wisata tersebut dapat berkembang dan dapat menarik wisatawan untuk datang. Selain hal tersebut dibentuk dan dibinanya POKDARWIS ini dapat membantu dan mengangkat pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang.

Usaha Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata tidak hanya itu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang juga mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bahwa sejak terbentuk program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata tiap tahun diadakan pembinaan dan pelatihan. Tahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang keliling-keliling kecamatan melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS di setiap desa

wisata. Kemudian tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dua kali untuk seluruh pengurus desa wisata. Pembinaan dilakukan juga agar masyarakat tahu arti pentingnya adanya desa wisata bagi masyarakat.

Pelatihan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menurut Bapak Iwan staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam Wawancara 28 September 2017 yaitu pelatihannya seperti pelatihan pengelolaan daya tarik wisata, pelatihan bahasa inggris dan ada juga pelatihan kuliner yaitu mengelola menu sarapan pagi di desa wisata. Pelatihan ini dilakukan agar masyarakat mampu melayani wisatawan dengan baik dan mampu mengelola desa wisata agar dapat berkembang sehingga menjadi sesuatu yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain pembentukan POKDARWIS, pelatihan dan pembinaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memberikan dana kepada setiap desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Banyaknya jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang membuat dana tidak menjangkau semua desa wisata tersebut. Hal tersebut membuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang memberikan dana secara bergantian ke berbeda desa wisata setiap tahunnya. Pemilihan desa wisata yang diberikan dana berdasarkan apa yang dibutuhkan desa wisata dalam waktu itu. Misalnya, ada desa wisata yang membutuhkan fasilitas toilet, gapura atau

perbaikan akses jalan. Sehingga hal tersebut dapat mengatasi banyaknya jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang, dan pemberian dana juga dapat merata ke setiap desa wisata yang ada.

Bapak Iwan selaku staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyebutkan dana untuk desa wisata tahun 2016 jumlahnya Rp 1.300.000.000,00. Pembagian dana tahun 2016 diberikan kepada lima desa. Desa tersebut adalah desa Wot Gale mendapat Rp. 300.000.000,00, untuk perbaikan akses jalan, desa Tegal Randu mendapat Rp.400.000.000,00, untuk pembuatan warung apung desa Gucialit mendapat 150.000.000,00, untuk pembangunan Gapura selamat datang desa Sidomulyo mendapatkan Rp. 300.000.000,00 untuk pembangunan loket, penambahan boot, perluasan tempat parkir dan desa Sidorejo Rp.150.000.000,00 untuk pembangunan sirkuit motor cros. Dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing desa wisata.

Pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini sendiri membuat antusias masyarakat tinggi. Hal tersebut terbukti dari tanggapan masyarakat bahwa banyak yang ingin membentuk desa wisata di desanya. Hal itu karena adanya desa wisata sangat menguntungkan masyarakat dari aspek ekonomi karena masyarakat dapat bekerja dan berjualan di desa wisata. Selain itu juga mendatangkan keuntungan bagi desa yaitu mendapat pendapatan dari wisatawan yang masuk desa wisata. Hal tersebut kenapa dapat menguntungkan karena Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan tidak memungut apa-apa dari desa wisata. Desa wisata dibentuk dan dibangun dengan usaha masyarakat sendiri dan hasilnya juga untuk mereka sendiri dengan bantuan dan pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bantuan dan pembinaan tersebut diberikan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam bantuan dana dan pelatihan-pelatihan pemberian motivasi, dan pengelolaan daya tarik wisata.

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana dari penjelasan diatas yaitu kerjasama antara organisasi pelaksana (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang) dengan kelompok sasaran (masyarakat Kabupaten Lumajang). Kerjasama tersebut antara lain seperti pembentukan POKARWIS, pelatihan dan pembinaan masyarakat dan pemberian dana dalam mengelola desa wisata. Hal tersebut dilakukan demi lancarnya pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata.

a. Faktor Pendukung

1) Dana

Dana merupakan salah satu hal penting untuk keberhasilan suatu program, dana dibutuhkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Dana dapat mendukung implementasi suatu program. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh

Kunarjo (2002: 24) bahwa program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan.
- c. Adanya aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Pendapat diatas menyebutkan bahwa harus adanya perkiraan anggaran atau dana yang perlu atau dibutuhkan. Demi keberhasilan sebuah implementasi dibutuhkan dana atau anggaran dalam pelaksanaanya. Fungsi dari dana atau anggaran sendiri penting, dana mendukung proses pelaksanaan program seperti untuk menunjang sarana, prasarana, dan lain-lain.

Dana dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Banyaknya jumlah Desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang membuat dana tidak dapat diberikan ke semua desa wisata sekaligus setiap tahunnya. Meskipun demikian, namun setiap tahun dana diberikan ke beberapa desa wisata yang berbeda dengan tujuan pemerataan dana. Dana ini diberikan kepada desa wisata yang membutuhkan sebagai upaya pengembangan seperti fasilitas yang diperlukan, akses jalan, toilet, dan lain-lain. Pemberian dana ke berbeda desa wisata (pemerataan) dalam setiap tahunnya hal tersebut banyaknya jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang dapat memperoleh dana secara keseluruhan.

Sehingga pembangunan desa wisata juga dapat merata diantara desa wisata–desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang.

Bapak Iwan selaku staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyebutkan dana untuk desa wisata tahun 2016 jumlahnya Rp 1.300.000.000,00. Pembagian dana tahun 2016 diberikan kepada lima desa. Desa tersebut adalah desa Wot Gale mendapat Rp. 300.000.000,00, desa Tegal Randu mendapat Rp.400.000.000,00, desa Gucialit mendapat 150.000.000,00, desa Sidomulyo mendapatkan Rp. 300.000.000,00 dan desa Sidorejo Rp.150.000.000,00. Dana tersebut digunakan untuk apa? itu tergantung kebutuhan dari desa wisata itu apa.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebuah program yang akan diimplementasikan sangat tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan, setiap kebijakan atau program menghabiskan anggaran yang berbeda-beda. Sumberdaya keuangan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah maupun swasta. Kemudian untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program perlu di dukungnya dengan peralatan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya peralatan sarana dan prasarana yang memadai akan mengurangi efisiensi dan keefektifan dalam implementasi kebijakan atau program.

Proses implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di dalamnya terdapat dana. Dana merupakan hal yang penting untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan seperti pembangunan

sarana dan prasarana. Dana untuk program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Adanya dana tersebut sehingga mampu mendukung pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini berjalan baik. Berjalan baiknya program ini juga dapat memberi dampak kepada masyarakat. Masyarakat terdukung aspek ekonominya dengan terbentuknya desa wisata di desanya.

2) Sumber Daya Alam

Pembangunan pariwisata menurut Yoeti yang dikutip oleh Muljadi (2009:40) adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala. Kabupaten Lumajang sendiri mempunyai potensi dan daya tarik alam yang beraneka ragam. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara 28 september 2017 bahwa potensi alam Kabupaten Lumajang itu luar biasa. Kabupaten Lumajang itu memiliki potensi alam mulai kering sampai yang berair. Potensi alam berair itu sepanjang garis selatan perbatasan Kabupaten Lumajang itu laut. Laut tersebut mulai dari desa Wot Gale yang paling timur sampai ke pantai Watu Godek yang paling barat. Kemudian, ada segitiga ranu, mulai dari ranu Bedali, ranu Klakah dan ranu Pakis. Ada lagi ranu di sekitar Gunung Semeru yaitu Ranu Pane,

Ranu Regulo dan Ranu Kumbolo. Sedangkan untuk air terjun mulai dari Tumpak Sewu, Kapas Biru dan lain-lain. Sedangkan potensi keringnya, contohnya bukit b29, Gunung Semeru, dan lain-lain. Banyaknya potensi alam tersebut artinya cukup sebagai bahan untuk membangun pariwisata di Kabupaten Lumajang. Pembangunan tersebut diaplikasikan dalam bentuk program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Priasukmana (2001:37) yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan. Kabupaten Lumajang memiliki banyak potensi wisata dengan keindahan alam yang dapat dijadikan destinasi wisata. Keindahan alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sebuah desa wisata. Desa wisata ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Lumajang melalui sektor pariwisata. Kesejahteraan tersebut diantaranya adalah aspek ekonomi. Adanya desa wisata ini masyarakat Lumajang tentunya dapat menambah pendapatan dengan berjualan atau bekerja di desa wisata.

Kekayaan alam Kabupaten Lumajang contohnya seperti yang terdapat di tabel. 10 Daya Tarik Wisata di Desa Wisata Argosari. Desa wisata Argosari memiliki tujuh obyek wisata yang merupakan wisata

alam. Ketujuh obyek wisata tersebut adalah Puncak B.29, Pura MGSA, air terjun Manggisan, air terjun Sobyok, ranu Pane, ranu Regulo dan ranu Kumbolo. Hal tersebut menandakan bahwa potensi wisata alam benar mendominasi wisata di Kabupaten Lumajang. Hal itu karena Kabupaten Lumajang kaya akan potensi alam yang indah yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Lumajang.

Potensi alam ini menjadi dukungan dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini. Hal tersebut karena dengan banyaknya potensi alam, untuk membentuk sebuah desa wisata yang memiliki daya tarik menjadi lebih mudah karena sudah terdapat karakteristik yang khas yang menjadi daya tarik desa wisata tersebut. Itulah mengapa potensi alam yang terdapat di Kabupaten Lumajang menjadi faktor pendukung dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

b. Faktor Penghambat

1) Kesadaran Masyarakat

Andersen dalam Islamy (2004:108) menjelaskan bahwa sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan salah satu diantaranya adalah respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah dan adanya kesadaran masyarakat untuk menerimanya. Karena seperti apapun program tersebut ditujukan untuk masyarakat, apabila masyarakat tidak mau menerima dan sadar maka sebuah program tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kurangnya

kesadaran masyarakat dalam merawat dan membangun wisata yang ada di Kabupaten Lumajang menjadikan hambatan pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Kurangnya kesadaran ini dari masyarakat desa wisata sendiri maupun pengunjung. Memang sebagian masyarakat sadar akan pentingnya pariwisata namun ada juga masyarakat yang kebiasaanya dan kesadaranya kurang dan merugikan bagi pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan membangun wisata yang ada di Kabupaten Lumajang dirasa menjadikan hambatan dalam program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Hal itu seperti yang dikatakan Bapak Iwan staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada wawancara 28 september 2017 bahwa pernah ada pengunjung yang kehilangan sepeda motornya pada saat mengunjungi salah satu obyek wisata pada suatu desa wisata. Melihat hal itu membuktikan bahwa dari sisi masyarakat masih ada yang belum mengerti akan keamanan dalam membangun desa wisata. Masyarakat Kabupaten Lumajang harusnya menjaga keamanan, kebersihan, dan lain-lain yang ada di desa wisata agar pengunjung senang dan tertarik untuk kembali berkunjung lagi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Edi selaku Sekertaris dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang bahwa jasa ojek di obyek wisata B.29 desa wisata Argosari dalam melayani wisatawan banyak yang berebut penumpang antar jasa ojek sehingga menjadi konflik antar jasa ojek. Hal tersebut dapat meresahkan pengunjung yang datang, tentunya juga mengurangi kesenangan pengunjung dalam menikmati desa wisata yang ada. Selain itu, jasa ojek juga ada yang memasang tarif tinggi berbeda dengan peraturan yang ada. Hal tersebut biasanya dilakukan jasa ojek kepada wisatawan asing atau jasa-jasa ojek gelap yang tidak berpangkal di tempat ojek yang sudah ditentukan. Masyarakat harusnya tidak boleh mementingkan keinginan dan keuntungan diri sendiri dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini. Jika masyarakat berbuat yang merugikan pengunjung, hal itu akan berdampak terhadap desa wisata. Pengunjung akan enggan ke desa wisata tersebut karena pelayanan dan pengelolaanya tidak bagus dan desa wisata akan menjadi sepi tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat maupun desa itu sendiri.

Selain perilaku masyarakat yang merugikan pengunjung seperti yang diungkapkan diatas, ada juga desa wisata yang perkembangannya sangat sedikit bahkan hampir tidak berkembang. Desa wisata tersebut sepi pengunjung dan kurang menarik bagi wisatawan. Perkembangan dan kemajuan dari desa wisata tersebut juga lambat. Desa wisata tersebut contohnya seperti Tabel.11 Contoh Daya Tarik Wisata di Desa Wisata

Ranuwuring. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau antusias masyarakat yang kurang dalam membangun dan mengelola desa wisatanya sehingga daya tarik wisata yang ada di desa tersebut kurang. Minimnya daya tarik wisata yang ada di desa wisata tersebut membuat sedikit wisatawan yang tertarik dan berkunjung. Sikap masyarakat yang malas mengelola dan melakukan pengembangan seperti ini tentunya dapat menjadi hambatan dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan penjelasan diatas kesadaran masyarakat desa wisata ini berperan penting dalam pelaksanaan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata. Kurangnya kesadaran masyarakat desa wisata dalam mengelola desa wisatanya tentunya dapat merugikan bagi desa wisatanya. Jika hal tersebut terus terjadi akan menyebabkan desa wisata yang ada di desa tersebut sepi pengunjung dan tidak memperoleh keuntungan atau pendapatan dari adanya desa wisata.

2) Sarana dan Prasarana

Menurut Yoeti (1997:179) sarana kepariwisataan dapat diartikan semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan tetapi hidup dan kehidupan tidak selamanya tergantung kepada wisatawan. Sedangkan prasarana menurut Yoeti (1994:334) adalah fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar seddemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sarana kepariwisataan terbagi menjadi tiga

dimana semuanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan antara lain:

- a. Sarana pokok kepariwisataan, yaitu perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada lalu lintas wisatawan yang melakukan wisata, yang fungsinya mempersiapkan dan merencanakan wisatawan. Termasuk dalam kelompok ini adalah hotel, losmen, wisma, restoran, dan lain-lain.
- b. Sarana perlengkapan kepariwisataan, adalah fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok, sehingga fungsinya membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah atau tempat yang dikunjunginya, yang termasuk dalam kelompok ini adalah fasilitas-fasilitas untuk bermain olahraga, dan beribadah.
- c. Sarana penunjang kepariwisataan, adalah fasilitas yang diperlukan untuk menunjang sarana prasarana pokok sarana pelengkap yang berfungsi agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjungi tersebut, yang termasuk dalam kelompok ini adalah keberadaan pasar yang menjual berbagai hasil kerajinan dan masyarakat setempat.

Menurut Lothar A Kreek yang dikutip Yoeti (1994:346), membagi prasarana menjadi dua kelompok yaitu, prasarana perekonomian yang terdiri dari transportasi, komunikasi, perbankan, dan kelompok prasarana yang tergolong utilitas. Kemudian yang kedua adalah prasarana sosial yaitu, faktor keamanan, petugas yang langsung melayani wisatawan seperti polisi, pramuwisata dan lain-lain, dan pelayanan kesehatan.

Sarana dan Prasarana yang ada di desa wisata Kabupaten Lumajang masih banyak yang kurang. Seperti yang diungkapkan Bapak Fasluqi staf Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam wawancara 28 september 2017 bahwa masih terdapat jalan yang sulit dilalui dilapangan. Keadaan jalan yang kurang baik merupakan salah satu penyebab ketidaknyamanan wisatawan untuk

berkunjung, keadaan jalan yang kurang baik kebanyakan jalan menuju ke obyek wisata di beberapa desa wisata. Seperti di desa wisata Sidomulyo jalan menuju obyek wisata Air Terjun Kapas Birunya sulit unruk dilalui. Hal itu membuat Wisatawan enggan untuk berkunjung ke obyek wisata Kapas Biru. Prasarana lain seperti keamanan dan pelayanan kesehatan di beberapa obyek wisata pada sebuah desa wisata juga tidak tersedia. Hal ini tentunya membuat kurangnya pelayanan terhadap pengunjung. Jika terjadi sesuatu seperti kecelakaan terhadap pengunjung maka pengunjung tersebut harus dilarikan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit. Puskesmas terdekatpun berada di Kecamatan yang rata-rata sedikit jauh dari desa wisata.

Selain prasarana yang kurang, sarana seperti toilet, dan tempat parkir juga tidak tersedia pada beberapa obyek wisata di desa wisata. Hal itu menyebabkan sulitnya pengunjung dalam mencari tempat parkir dan buang air pada saat mengunjungi obyek wisata tersebut. Sarana yang sudah tersedia juga ada yang rusak karena tidak dirawat dengan baik seperti coret-corek, buang sampah sembarangan dan tidak menjaga fasilitas yang ada. Hal tersebut kembali karena faktor masyarakatnya yang kurang akan kesadarannya.

Hambatan sarana dan prasarana tersebut selain karena tidak tersedia juga karena banyak sarana dan prasarana yang rusak karena ulah pengunjung maupun kurang perawatan dari masyarakat. Masih terdapat pengunjung yang kurang kesadarannya untuk menjaga sarana dan prasarana

yang ada. Masyarakat desa wisata atau Pokdarwis dari desa wisata tersebut juga masih kurang dalam merawat sarana dan prasarana yang ada. Harusnya perawatan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata menjadi tanggung jawab Pokdarwis dari desa wisata.

Terdapat banyak desa wisata yang sarana dan prasarananya belum terpenuhi hal ini karena pemerintah belum membantu desa wisata terkait dalam pemenuhan sarana prasarana. Rusaknya sarana dan prasaran juga karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaganya. Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana ini tentunya menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk datang ke desa wisata. Hal itu karena fasilitas adalah hal yang penting yang harus ada di dalam desa wisata. Lengkapnya sarana dan prasarana di sebuah desa wisata tentunya membuat kondisi desa wisata nyaman, dan hal tersebut membuat banyak wisatawan datang yang akan memberi keuntungan bagi desa dan masyarakatnya. Hal ini mengapa sarana dan prasarana menjadi hambatan dalam implementasi program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata.